

ABSTRAK

IMPLEMETASI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DI POLDA SUMUT (STUDI PUTUSAN: PUT KKEP / 27 / IX / 2019 / KKEP)

**Oleh
MEIDA RIANI SILALAH
190315021**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian tindakan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di Polda Sumut, untuk mengetahui Apa saja kategori tindakan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan data-data primer melalui sumber data untuk tujuan khusus dalam penelitian yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, Kategori tindakan pelanggaran kode etik profesi kepolisian adalah pelanggaran etika kenegaraan, pelanggaran etika kelembagaan, pelanggaran etika kemasyarakatan dan pelanggaran etika kepribadian. Pelanggaran kode etik yang paling banyak dilakukan oleh jajaran anggota Polri Polda Sumut adalah pelanggaran kode etik kelembagaan. Pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan adalah dalam bentuk tidak menjalankan tugas atau tidak masuk dinas lebih dari 300 (tiga ratus) hari tanpa alasan yang jelas. Kedua, Bentuk penyelesaian tindakan pelanggaran kode etik profesi polri Polda Sumut adalah melalui pemeriksaan anggota polri yang di duga atau di laporkan melakukan tindakan pelanggaran kode etik profesi kepolisian, selanjutnya akan dilakukan audit investigasi untuk menganalisa duduk perkara, pemberkasan dan atau pendokumentasian dan pelaksanaan sidang komisi kode etik polri untuk memutuskan perkara, jika keberatan pelanggaran juga melakukan banding. Bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik di Polda Sumut meliputi pelanggaran etika kepribadian, etika negara, etika kelembagaan, etika dalam hubungan dengan masyarakat dan pelanggaran lainnya. sedangkan sanksi pelanggaran yang dijatuhkan adalah, meminta maaf, pindah jabatan, pindah tugas daerah, pemberhentian dengan hormat (PDH) dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Kata kunci: tindak pidana, pelanggaran, kode etik.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF POLRI REGULATION NUMBER 14 OF 2011 CONCERNING CODE OF CONDUCT TOWARDS POLICE MEMBERS IN POLDA NORTH SUMATERA (STUDY OF DECISION: PUT KKEP/27/IX/2019/ KKEP)

By

**MEIDA RIANI SILALAH
190315021**

This thesis aims to find out the form of resolution for acts of violation of the professional code of ethics committed by members of the Police at the North Sumatra Regional Police, to find out what are the categories of acts of violation of the professional code of ethics committed by members of the Police. This thesis uses a normative-empirical approach by using primary data through data sources for specific purposes in research related to violations of the police professional code of ethics. Based on the research conducted, the following results and conclusions were obtained: first, the categories of acts of violating the police professional code of ethics are violations of state ethics, institutional ethics violations, social ethics violations and personality ethics violations. The most frequent violations of the code of ethics by members of the North Sumatran Police are violations of the institutional code of ethics. Violations of the code of ethics that are committed are in the form of not carrying out duties or being absent from service for more than 300 (three hundred) days without a clear reason. Second, the form of resolution for violating the police professional code of ethics for the North Sumatran Police is through examining members of the National Police who are suspected or reported of having committed acts of violating the police professional code of ethics, then an investigative audit will be carried out to analyze the case, filing and/or documenting and carrying out commission hearings. the police code of ethics for deciding cases, if there are objections to violations, an appeal is also made. The forms of sanctions against Polri members who commit criminal acts of violating the code of ethics at the North Sumatra Regional Police include violations of personality ethics, state ethics, institutional ethics, ethics in relations with society and other violations. while the sanctions for violations imposed were, apologizing, changing positions, changing regional assignments, respectful discharge (PDH) and dishonorable discharge (PTDH).

Keywords: crime, violation, code of ethics.